



**EFEKTIVITAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI KORLANTAS
POLRI DAN STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA**

Oleh

Zulkifli¹, Cornelis Ferdinan Hotman Sirait^{2*}, Agustinus Miranda³

^{1,2,3}Magister Manajemen, Universitas Pancasila

Email: ^{2*}Hotman@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategy Penegakkan Hukum Untuk Meningkatkan Kinerja organisasi Korlantas Polri dengan faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (campuran). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) yang diolah dengan Smart PLS 3.0 untuk analisis kuantitatif, sedangkan untuk analisis kualitatif menggunakan SWOT, IFE & EFEdan QSPM. Hasil penelitian kuantitatif membuktikan bahwa variabel Teknolgi Digital, Inovasi, Kapabilitas Organisasi serta Komitmen Manajemen hampir semua variabel berpengaruh terhadap Strategi Penegakkan dan Kinerja organisasi, kecuali Teknolgi Digital yang tidak berpengaruh kepada Kinerja organisasi. Adapun hasil penelitian analisa strategi melalui tahapan strategi input stage dengan IFE & EFE matching stage dengan TOWS dan decision stage dengan QSPM maka strategi yang digunakan dari hasil QSPM adalah Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif

Kata Kunci: Teknologi Digital, Inovasi, Kinerja organisasi, Komitmen Manajemen

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah pimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk membawa POLRI yang bertransformasi PRESISI (Predictive, Responsibilitas & Transparansi Berkeadilan). Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat seharusnya mempunyai kapasitas pengetahuan dalam memahami produk hukum dan menghindari dampak negatif yang di timbulkan dari tindakan kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas anggota Polri harus ditingkatkan sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0. Proses pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri harus memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi agar diperoleh keuntungan organisasi pendidikan berupa efisiensi. peningkatan kualitas Polri

yang sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0 itu penting untuk interoperabilitas komunikasi Polri dan pihak lain. Keuntungan lain adalah pengajaran kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penugasan selanjutnya di wilayah Polda seluruh Indonesia. Polri harus dapat mengantisipasi peluang dan ancaman yang ditimbulkan dari Revolusi industri 4.0 Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 bisa meningkatkan kecanggihan sarana-prasarana Polri namun pada saat bersamaan dapat pula menimbulkan jenis kejahatan baru.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 Kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak



100.028 kasus. Adapun, kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan kerugian materi mencapai Rp246 miliar. Sementara jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu sebanyak 10.553 orang, dan korban luka ringan 117.913 orang. Berdasarkan jenis kendaraan, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dengan persentase 73%. Urutan kedua adalah angkutan barang dengan persentase 12%. Hal ini menyebabkan permasalahan seperti tingginya angka kecelakaan, kemacetan, over dimensi over loading (odol), kerusakan infrastruktur, dan polusi udara. Namun yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah odol karena berdampak juga pada permasalahan lainnya.

Jika dilihat trennya sejak 2017, kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia cenderung fluktuatif. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 116.411 kasus, dan yang terendah terjadi pada tahun 2020, yakni 100.028 kasus.

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya lebih dari 100 ribu kasus sehingga membutuhkan Strategi Penegakkan Hukum dalam rangka menurunkan angka Kecelakaan Lalu lintas dan meningkatkan kinerja organisasi Korlantas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang menakutkan bagi para pengguna kendaraan di jalan raya, baik yang menggunakan roda dua maupun yang menggunakan roda empat. Kecelakaan lalu lintas ini dapat sering kali terjadi tanpa terduga sebelumnya, dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Seringkali dari diri kita sendiri telah berusaha untuk berhati-hati namun tetap saja ada hal yang lain yang menyebabkan kita mengalami kecelakaan lalu lintas.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli,

penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dari latar belakang diatas dapat disampaikan bahwa kinerja Korlantas masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama untuk penegakkan hukum.

LANDASAN TEORI

Strategi Penegakkan Hukum

Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahannya yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Dalam prakteknya pilihan strategi merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko. Beberapa strategi organisasi diharapkan dapat menghadapi lingkungan yang kompetitif. Disini manajer merencanakan buaran kekuatan dan kelemahan organisasi dengan kesempatan dan ancaman di lingkungannya.

Strategi dirumuskan dalam dua perspektif berbeda, yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi.

Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang artinya para manajer akan menganggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Strategi ini dikenal sebagai strategi adaptif. Pembahasan pada materi ini akan lebih di tekankan pada peranan aktif manajer yang dikenal sebagai perencanaan strategis yang fokusnya luas dan berjangka panjang.



Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “to police,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.

Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan¹². Penegakan hukum bidang pencegahan, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dimana di dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena merupakan suatu sistem lalu lintas untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan pre-emptif.

Analisis Manajemen Strategis

Fred-Forest David (2015) menyatakan bahwa para ahli strategi (akademisi dan praktisi) tentunya tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif yang dapat menguntungkan perusahaan, karena ada tindakan-tindakan yang mungkin jumlahnya tak terhingga dan sejumlah cara untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, alternatif yang paling menarik yang dapat dikelola harus dikembangkan, diperiksa, diprioritaskan, dan dipilih. Sehingga keuntungan, kerugian, pertukaran, biaya, dan manfaat dari strategi ini harus ditentukan. Teknik formulasi strategi yang penting dapat diintegrasikan dalam tiga kerangka kerja analitis formulasi strategi; yaitu Tahap 1 - Tahap Input, Tahap 2 - Tahap Pencocokan dan Tahap 3 – Tahap Keputusan.

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)

Menurut David (2009), teknik Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix – QSPM) merupakan salah satu metode analisis dalam literatur yang dirancang dalam penentuan daya tarik secara relatif dari berbagai alternatif tindakan. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis input dari Tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis Tahap 2 untuk secara objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan diantara strategi-strategi alternatif. Analisis strategi yang dilakukan adalah menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) secara objektif mampu menunjukkan strategi mana yang terbaik dari berbagai alternatif (Mahfud, T. 2017) (Mas’ud E dan Imam S.2016) (Puspitasari N., B., Rumita., Rani, Pratama G. Y., 2013) (Purwandari, S., 2015).

METODE PENELITIAN



etode dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif Method dengan analisis manajemen strategik Fred David, pada tahap input digunakan IFE-EFE, Tahap Pencocokan digunakan Analisis TOWS Matrix dan pada tahap Keputusan digunakan QSPM. Objek penelitian ini adalah Korlantas Mabes Polri dengan juga dilakukan FGD pada Pimpinan Korlantas Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan/Organisasi

Korps Lalu Lintas (Korlantas) adalah sebuah unsur pelaksana utama Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kapolri. bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum masalah lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Korlantas sebenarnya sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, Pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu sebuah wadah untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat. Sehingga pada tanggal 15 Mei 1915 lahirlah organ lalu lintas yang disebut Voer Wesen, dan diperbaharui menjadi Verkeespolitie, yang artinya Polisi Lalu Lintas dalam bahasa asli Belanda.

Memasuki zaman penjajahan Jepang, peran Korlantas sedikit mengalami gradasi. Berbagai tugas keamanan dan pengamanan yang diambil oleh militer Jepang membuat Korlantas dilakukan oleh Kempetai (sebutan untuk Polisi Militer Jepang). Walaupun naik turun melalui zaman Penjajahan Jepang dan masa Kemerdekaan, eksistensi Korlantas dipertegas pada tanggal 22 September 1955. Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Order No 20 / XVI / 1955 tanggal 22 September 1955, tentang Pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan, di bawah Kepala Kepolisian Negara. Tanggal 22

September inilah yang menjadi acuan dari ulang tahun Korlantas yang dirayakan hari ini.

Input & pembahasan Analisis Qualitative

FGD dilanjutkan dengan input dalam analisis Qualitative, terutama untuk merumuskan bahan masukan untuk analisis IFE-EFE, TOWS Matrik maupun QSPM dengan di dahului oleh beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada peserta:

1) *Bagaimana Kondisi Internal & Eksternal Korlantas*

Kesimpulan jawaban peserta FGD :

Kondisi Internal pada saat ini Korlantas sedang di lakukan Transformasi Digital baik dalam sistem dan operasi untuk meningkatkan Citra Polisi menuju Polri Presisi, dilakukan juga Transformasi organisasi menyesuaikan dengan era Vuca dan era Revolusi Industri 4.0. Transformasi organisasi dan digital dilakukan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik. Peningkatan juga dilakukan pada kompetensi SDM, paradigma Budaya adaptif dan pola kepemimpinan adaptif.

Kondisi Eksternal pada saat ini Polri dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja pelayanan publik agar efektif dan efisien, tuntutan masyarakat dan juga amanat presiden Republik Indonesia. Lingkungan politik relatif stabil termasuk stabilitas keamanan cukup kondusif. Covid 19 yang berubah ke endemi membuka peluang bangkitnya sektor ekonomi dan industri termasuk juga sektor transportasi sehingga menuntut peranan Korlantas Polri. Era Revolusi Industri menuntut dikembangkannya Teknologi yang menyesuaikan dengan Transformasi Organisasi dan juga Transformasi Pelayanan Publik pada lembaga negara. Korlantas Polri membutuhkan Strategi Pemnegakkan Hukum Untuk menjalankan Sistem dan operasi agar mencapai kinerja Organisasi.

2) *Bagaimana Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Korlantas*



Kesimpulan Jawaban Peserta FGD:

Kekuatan : Dukungan Pimpinan Korlantas Polri Untuk Transformasi Digital, Peningkatan anggaran , Penguatan sarana dan prasarana khususnya dalam Transformasi Digital, Visi pimpinan yang sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Leadership, terlaksananya adanya komitmen manajemen yang tinggi dalam penegakkan hukum.

Kelemahan : Integrasi data dan Informasi belum berjalan secara baik, Dukungan anggaran tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan totalitas Transformasi Digital, Kompetensi SDM belum sepenuhnya bertransformasi menjadi SDM Digital.

Ancaman : Tindakan kejahatan yang semakin canggih dengan Teknologi, Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat, Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang Transportasi lalu Lintas, Moralitas dan Attitude pengguna lalu lintas yang belum baik, Infrastruktur Transportasi dan jalan Raya yang belum mendukung sepenuhnya.

Peluang : Kolaborasi antar instansi Publik untuk peningkatan pelayanan publik, Era Revolusi Industri 4.0 mendorong Transformasi Digital, Era Vuca mendorong agile strategy dan kepemimpinan yang agile, Komunikasi efektif dengan masyarakat

3) ***Bagaimana Komitmen manajemen yang dilaksanakan di Korlantas***

Kesimpulan Jawaban Peserta :

Pimpinan Korlantas menunjukkan komitmen yang tinggi dalam peningkatan kinerja Organisasi di Korlantas Polri. Khususnya untuk penegakkan hukum , proses Transformasi dan menciptakan keadilan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan trust kepercayaan dari publik dan sebagai amanah lembaga negara.

4) ***Apakah Penerapan Teknologi Digital saat ini sudah berjalan baik dan apa yang akan di kembangkan***

Kesimpulan jawaban Peserta :

Penerapan Teknologi Digital saat ini sudah berjalan baik dan secara bertahap semua aspek sistem dan operasional akan menggunakan Teknologi Digital dan akan dikembangkan untuk semua aspek operasi termasuk sistem pembuatan SIM baru secara digital, BPKB secara digital, peningkatan aplikasi ETLE, updating dan teknologi kekinian dan rambu lalu lintas dan trafik light, percepatan penanganan lalu lintas. Dibutuhkan khusu untuk Teknologi Digital dan Informasi untuk Komitmen dalam penegakkan Hukum.

5) ***Bagaimana Pola kepemimpinan yang akan di terapkan di Korlantas***

Kesimpulan Jawaban Peserta :

Pola kepemimpinan yang akan di terapkan adalah kepemimpinan yang bertransformasi secara digital serta mengembangkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis

6) ***Apakah organisasi yang berjalan saat ini cukup efektif***

Kesimpulan Jawaban Peserta :

Organisasi yang dijalankan saat ini sudah cukup efektif dengan terus melakukan perbaikan dalam era Vuca yang menuntut agilitas organisasi denan menanamkan budaya adaptif pada semua personil Korlantas. Peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan dengan melakukan Transformasi Organisasi.

7) ***Apakah Kinerja Organisasi saat ini berjalan baik***

Kesimpulan Jawaban Peserta FGD :

Kinerja Organisasi yang berbasis pada AKIP sudah menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja, analisis kelemahan dan kekurangan terus dilakukan untuk dapat mengantisipasi tidak tercapainya semua indikator dalam penilaian AKIP. Kinerja Organisasi



membutuhkan inovasi dan Transformasi Digital untuk dapat lebih memuaskan pelayanan publik

8) *Bagaimana Strategi Pengakkan Hukum Yang dilaksanakan di Korlantas*

Kesimpulan Jawaban Peserta FGD :

Strategi Penegakkan Hukum yang dilaksanakan di Korlantas Polri harus dilakukan inovasi dengan Transformasi digital pada sisitem operasionalnya sehingga di dapatkan akurasi dan terjadi integrasi data antar unit di lingkungan Korlantas Polri. Strategi lainnya yaitu melakukan pendekatan secara holistik kepada masyarakat sehingga terjadi timbal balik dari masyarakat.

Pembahasan Formulasi Strategi

Penelitian ini sebelum melalukan Formula Strategi, maka perlu menganalisis faktor EFE dan IFE, sebagai Input Stage, TOWS Matriks sebagai Matching Stage dan QSPM Matriks sebagai Decision Stage. Analisis dilakukan pertama-tama dengan menganalisa faktor-faktor eksternal organisasi yang akan mempengaruhi Kinerja Korlantas Polri khususnya dalam inovasi pelayanan publik dan kemudian berdasarkan pemahaman atas faktor eksternal tersebut dilanjutkan dengan menganalisa faktor internal Korlantas Polri dalam mewujudkan visinya untuk melayani publik dan tercapainya sisten lalu lintas di Indonesia yang baik,

Input Stage

External and Internal Factor Evaluation (EFE) & (IFE)

a. Faktor Kekuatan (Stregth)

- 1) Dukungan Pimpinan Korlantas Polri Untuk Transformasi Penegakkan Hukum
- 2) Peningkatan anggaran untuk Penegakkan Hukum
- 3) Penguatan sarana dan prasarana khususnya dalam Transformasi Digital dan Penegakkan Hukum

- 4) Visi pimpinan yang sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Leadership dan adaptif
- 5) Komitmen manajemen yang tinggi dalam penegakkan hukum.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Integrasi data dan Informasi belum berjalan secara baik
- 2) Dukungan anggaran tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan totalitas Transformasi Digital & Penegakkan Hukum
- 3) Kompetensi SDM belum sepenuhnya bertransformasi menjadi SDM Digital dan Berbudaya Adaptif.
- 4) Agilitas organisasi membutuhkan Transformasi Organisasi yang Belum Optimal
- 5) Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran

c. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Kolaborasi antar instansi Publik untuk peningkatan pelayanan publik
- 2) Era Revolusi Industri 4.0 mendorong Transformasi Digital
- 3) Era Vuca mendorong agile strategy dan kepemimpinan yang agile
- 4) Komunikasi efektif dengan masyarakat
- 5) Peningkatan Citra polri

d. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tindakan kejahatan yang semakin canggih dengan Teknologi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
- 2) Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat
- 3) Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang Transportasi lalu Lintas
- 4) Moralitas dan Attitude pengguna lalu lintas yang belum baik,
- 5) Infrastruktur Transportasi dan jalan Raya yang belum mendukung sepenuhnya.



Tabel 1. Matriks IFE

Faktor Internal IFE	Bobot	Skala (1-4)	IFE Skor
Kekuatan (Strength)			
1. Dukungan Pimpinan Korlantas Polri Untuk Transformasi Penegakkan Hukum	0,14	4	0,56
2. Peningkatan anggaran untuk Penegakkan Hukum	0,09	2	0,18
3. Penguatan sarana dan prasarana khususnya dalam Transformasi Digital dan Penegakkan Hukum	0,10	3	0,30
4. Visi pimpinan yang sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Leadership dan adaptif	0,08	3	0,24
5. Komitmen manajemen yang tinggi dalam penegakkan hukum.	0,09	4	0,36
Total	0,5		1,64
Kelemahan (Weakness)			
1. Integrasi data dan Informasi belum berjalan secara baik	0,12	1	0,12
2. Dukungan anggaran tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan totalitas Transformasi Digital & Penegakkan Hukum	0,08	2	0,16
3. Kompetensi SDM belum sepenuhnya bertransformasi menjadi SDM Digital dan Berbudaya Adaptif.	0,12	2	0,24
4. Agilitas organisasi membutuhkan Transformasi Organisasi yang Belum Optimal	0,10	2	0,30
5. Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran	0,08	1	0,08
Total	0,5		0,90
Total Skor	1		2,54

(Sumber : data olahan penulis, 2023)

Tabel 2. Matriks EFE

Faktor Eksternal EFE	Bobot	Skala (1-4)	IFE Skor
Peluang (Opportunity)			
1. Kolaborasi antar instansi Publik untuk peningkatan pelayanan publik	0,10	3	0,30
2. Era Revolusi Industri 4.0 mendorong Transformasi Digital	0,10	3	0,30
3. Era Vuca mendorong agile strategy dan kepemimpinan yang agile	0,09	3	0,27
4. Komunikasi efektif dengan masyarakat	0,07	3	0,21
5. Peningkatan Citra Polri	0,14	4	0,56
Total	0,5		1,64
Ancaman (Threat)			
1. Tindakan kejahatan yang semakin canggih dengan Teknologi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas	0,12	4	0,48
2. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat	0,10	4	0,40
3. Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang Transportasi lalu Lintas	0,10	3	0,30
4. Moralitas dan Attitude pengguna lalu lintas yang belum baik	0,08	3	0,24
5. Infrastruktur Transportasi dan jalan Raya yang belum mendukung sepenuhnya.	0,10	3	0,30
Total	0,5		1,72
Total Skor	1		3,36

Matching Stage

Matriks strategi TOWS merangkai perangkat pencocokan yang penting dalam mengembangkan empat tipe strategi yaitu strategi SO (Strengths-Opportunities), strategi WO (Weakness-Opportunities), strategi ST (Strengths-Threats) dan strategi WT (Weakness-Threats). Mencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal kunci merupakan bagian yang sulit dalam mengembangkan Matriks TOWS dan memerlukan penilaian yang baik.

Tabel 3. Matriks TOWS

Internal	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pimpinan Korlantas Polri Untuk Transformasi Penegakkan Hukum Peningkatan anggaran untuk Penegakkan Hukum Penguatan sarana dan prasarana khususnya dalam Transformasi Digital dan Penegakkan Hukum Visi pimpinan yang sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Leadership dan adaptif Komitmen manajemen yang tinggi dalam penegakkan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Integrasi data dan Informasi belum berjalan secara baik Dukungan anggaran tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan totalitas Transformasi Digital & Penegakkan Hukum Kompetensi SDM belum sepenuhnya bertransformasi menjadi SDM Digital dan Berbudaya Adaptif. Agilitas organisasi membutuhkan Transformasi Organisasi yang Belum Optimal Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran
Eksternal	Strengths Opportunities (SO)	Weakness Opportunities (WO)
<ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi antar instansi Publik untuk peningkatan pelayanan publik Era Revolusi Industri 4.0 mendorong Transformasi Digital Era Vuca mendorong agile strategy dan kepemimpinan yang agile Komunikasi efektif dengan masyarakat Peningkatan Citra polri 	<ol style="list-style-type: none"> Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum Transformasi organisasi menjadi organisasi yang agile dan adaptif Pengembangan Sarana dan Prasarana Digital Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kompetensi SDM Korlantas menjadi SDM Digital Kolaborasi Korlantas Polri di Bidang Teknologi Agilitas Organisasi & Agile Strategi Korlantas Di Era Revolusi Industri 4.0
Threats (Ancaman)	Strengths Threats (ST)	Weakness Threats (WT)
<ol style="list-style-type: none"> Tindakan kejahatan yang semakin canggih dengan Teknologi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang Transportasi lalu Lintas Moralitas dan Attitude pengguna lalu lintas yang belum baik, Infrastruktur Transportasi dan jalan Raya yang belum mendukung sepenuhnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Teknologi Di Bidang Lalu Lintas Transformasi organisasi yang agile Pendekatan Holistik ke Publik untuk penegakkan hukum di bidang lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kompetensi SDM Korlantas Polri menuju SDM Digital Peningkatan pelayanan masyarakat dengan layanan online Approach kepublik secara holistik untuk Regulasi di bidang lalu lintas

Berdasarkan hasil analisis pada Tows Matrik maka di dapatkan strategi strategi yang sebagai berikut :

1) Strengths Opprtunities (SO)

- Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum
- Transformasi organisasi menjadi organisasi yang agile dan adaptif
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Digital
- Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif

2) Weakness Opprtunities (WO)

- Pengembangan Kompetensi SDM Korlantas menjadi SDM Digital
- Kolaborasi Korlantas Polri di Bidang Teknologi



- c. Agilitas Organisasi & Agile Strategi Korlantas Di Era Revolusi Industri 4.0
- 3) **Strengths Threats (ST)**
 - a. Pengembangan Teknologi Di Bidang Lalu Lintas
 - b. Transformasi organisasi yang agile
 - c. Pendekatan Holistik ke Publik untuk penegakkan hukum di bidang lalu lintas
- 4) **Weakness Threats (WT)**
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Korlantas Polri menuju SDM Digital
 - b. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan layanan online
 - c. Approach kepublik secara holistik untuk Regulasi di bidang lalu lintas

Decision Stage

Berdasarkan pada data faktor-faktor Setelah dilakukan tahap input analisis lingkungan internal dan eksternal. Serta tahap pencocokan dengan matriks TOWS, maka tahap selanjutnya yakni tahap keputusan dengan menggunakan QSPM. Teknik ini secara objektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan input dari tahap pertama dan pencocokan dari tahap kedua untuk menentukan secara objektif diantara alternatif strategi. Penentuan skor daya tarik dilakukan dengan diskusi dengan responden terpilih di perusahaan jasa layanan transportasi online yaitu dengan mengamati setiap faktor tersebut apakah mempengaruhi terhadap pilihan strategi yang dibuat, dengan memberikan skor 1 (jika tidak memiliki daya tarik), 2 (jika daya tariknya rendah), 3 (jika daya tariknya sedang), dan 4 (jika daya tariknya tinggi).

Alternatif strategi yang dihasilkan akan dimasukan ke dalam QSPM sebagai berikut:

- 1. **Strategi 1** : Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum

- 2. **Strategi 2** : Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif
- 3. **Strategi 3** : Pendekatan Holistik & Edukasi ke Publik untuk penegakkan hukum

Tabel 4. Matriks QSPM

Faktor Kunci	Bobot	Alternatif Strategi					
		Digitalisasi Pada Sistem Penegakkan Hukum		Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif		Pendekatan Holistik & Edukasi Ke Publik Untuk Penegakkan Hukum	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
KEKUATAN (STRENGTH)							
1. Dukungan Pimpinan Korlantas Polri Untuk Transformasi Penegakkan Hukum	0,14	3	0,42	4	0,56	3	0,42
2. Peningkatan anggaran untuk Penegakkan Hukum	0,09	3	0,27	3	0,27	2	0,18
3. Penguatan sarana dan prasarana khususnya dalam Transformasi Digital dan Penegakkan Hukum	0,10	3	0,3	3	0,3	3	0,3
4. Visi pimpinan yang sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Leadership dan adaptif	0,09	3	0,27	4	0,36	2	0,18
5. Komitmen manajemen yang tinggi dalam penegakkan hukum.	0,09	3	0,27	4	0,36	4	0,36
KELEMAHAN (WEAKNESS)							
1. Integrasi data dan Informasi belum berjalan secara baik	0,12	3	0,36	4	0,48	3	0,36
2. Dukungan anggaran tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan totalitas Transformasi Digital & Penegakkan Hukum	0,08	3	0,24	3	0,24	2	0,16
3. Kompetensi SDM belum sepenuhnya bertransformasi menjadi SDM Digital dan Berbudaya Adaptif.	0,12	3	0,36	4	0,48	3	0,36
4. Agilitas organisasi membutuhkan Transformasi Organisasi yang Belum Optimal	0,1	2	0,2	4	0,4	3	0,3
5. Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran	0,08	3	0,24	3	0,24	3	0,24
TOTAL IFE			2,93		3,69		2,86
PELUANG (OPPORTUNITY)							
1. Kolaborasi antar instansi Publik untuk peningkatan pelayanan publik	0,10	3	0,3	3	0,3	4	0,4
2. Era Revolusi Industri 4.0 mendorong Transformasi Digital	0,10	3	0,3	4	0,4	3	0,3
3. Era VUCA mendorong agile strategy dan kepemimpinan yang agile	0,09	3	0,27	3	0,27	3	0,27
4. Komunikasi efektif dengan masyarakat	0,07	3	0,21	3	0,21	4	0,28
5. Peningkatan Citra Polri	0,14	3	0,42	3	0,42	3	0,42
ANCAMAN (THREAT)							
1. Tidak ada kejelasan yang semakin canggih dengan Teknologi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas	0,12	4	0,48	4	0,48	3	0,36
2. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat	0,10	4	0,4	3	0,3	3	0,3
3. Perubahan Kebijakan pemerintah di bidang Transportasi lalu Lintas	0,10	3	0,3	3	0,3	3	0,3
4. Moralitas dan Attitude pengguna lalu lintas yang belum baik	0,08	3	0,24	3	0,24	3	0,24
5. Infrastruktur Transportasi dan jalan Raya yang belum mendukung sepenuhnya.	0,10	3	0,3	3	0,3	3	0,3
TOTAL EFE			3,22		3,22		3,17
TOTAL KESELURUHAN			6,15		6,91		6,03

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas menjelaskan hasil dari perhitungan matriks QSPM diperoleh strategi alternatif dengan *Total Attractiveness Score* (TAS) masing-masing strategi yaitu :

- 1) Strategi 1 : Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum
- 2) Strategi 2 : Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif
- 3) Strategi 3 : Pendekatan Holistik & Edukasi ke Publik untuk penegakkan hukum



Maka didapatkan score untuk QSPM adalah sebagai berikut

- 1) Strategi 1 : Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif, mendapatkan point tertinggi yaitu 6,91
- 2) Strategi 2 : Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum, mendapatkan point 6,15 sebagai alternatif Strategi Kedua
- 3) Strategi 3 : Pendekatan Holistik & Edukasi ke Publik untuk penegakkan hukum , mendapatkan point 6,03 sebagai alternatif Strategi Ketiga

Action program yang dapat dilakukan pada masing masing strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1) **Strategi Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif**

Transformasi Kepemimpinan Digital Yang Perlu Dilakukan :

- a. Melakukan Transformasi kepemimpinan Digital pada semua pejabat utama Korlantas dan pimpinan lainnya
 - b. Transformasi Budaya Organisasi yang adaptif pada Semua anggota Korlantas
 - c. Melakukan Pembinaan & Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi SDM Digital
 - d. Penanaman visi dalam digital Leadership
 - e. Perencanaan Strategi dilakukan dengan prinsip agilitas strategy
 - f. Penyesuaian struktur organisasi dalam sistem yang agile dan adaptif
- 2) **Strategi Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum**
- a. Knowledge transfer untuk bidang teknologi khususnya dalam bidang teknologi Korlantas Polri
 - b. Penyesuaian terhadap sistem dan Standar operasional

prosedur sesuai dengan era

Vuca & Revolusi Industri 4.0

- c. Melakukan digitalisasi pada semua aspek operasional dalam sistem Teknologi Digital Penegakkan Hukum

3) **Strategi Pendekatan Holistik & Edukasi ke Publik untuk penegakkan**

- a. Sistem pelayanan publik bertransformasi secara digital
- b. Sosialisasi Publik untuk aspek pelayanan
- c. Kolaborasi antar stakeholder dalam pelayanan publik
- d. Sosialisasi & Edukasi kepada Publik untuk meningkatkan pelayanan

KESIMPULAN

Strategi Transformasi Kepemimpinan Digital & Adaptif, mendapatkan merupakan strategi utama yang dirumuskan pada penelitian ini dengan alternatif strategi Digitalisasi pada Sistem penegakkan Hukum, mendapatkan point 6,15 sebagai alternatif serta alternatif Strategi Pendekatan Holistik & Edukasi ke Publik untuk penegakkan hukum. Transformasi Budaya Organisasi yang adaptif pada Semua anggota Korlantas Polri Untuk dilakukan secara terus menerus melalui Pembinaan & Implementasi Kepemimpinan, selanjutnya melakukan Pembinaan & Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi SDM Digital dan penanaman visi dalam digital Leadership sesuai dengan Era Revolusi Industri 4.0 kepada semua pimpinan Korlantas Polri. Serta, perencanaan Strategi dilakukan dengan prinsip agilitas strategy serta Penyesuaian struktur organisasi Korlantas Polri dalam sistem yang agile dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrilita, Nur. (2013). "Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran Sepeda Motor Pada PT. Samekarindo Indah di Samaranda".



- [2] Ansoff, I. And McDonnell, H. (1990), *Implanting Strategic Management*, Second Edition, Prentice Hall International (UK) Ltd.
- [3] David, Fred R, 2011. *Strategic Management*, Buku 1., Jakarta: Indeks.
- [4] David, Fred R. dan Forest R. David. 2015. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] David, F.R., 2004. *Manajemen Strategis; Konsep – Konsep*, edisi Kesembilan, PT Indeks, Jakarta.
- [6] Darmadi, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Hartini, S. (2012). Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.14, No. 1.
- [8] Iskandar, Putri Y. A., Sani, M., Hamidah, S., dan Irawan, R. (2018). Kinerja Pemasaran Pada UKM Mebel di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Equilibrium*. Vol.15.
- [9] Lisa, Y., Mattila, A. S., & Lee, S. (2016). International Journal of Hospitality Management A meta-analysis of behavioral intentions for environmentally friendly initiatives in hospitality research. *International Journal of Hospitality Management*, 54, 107–115.
- [10] Nusair, N., Ababneh, R., & Bae, Y. (2012). The impact of transformational leadership style on innovation as perceived by public employees in Jordan. *International Journal of Commerce and Management*, 22(3), 182-2.
- [11] Pérez-de-Lema, D. G., E. Alfaro-Cortes, et al. (2012). "Strategy, Competitive Factors and Performance in Small and Medium Enterprise (SMEs)." *African Journal Business Management* 6.
- [12] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Utama, A. (2010). Peran Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Pada Era Kompetensi Global. *Jurnal Efisiensi*, 10(1):142.